

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kajian hubungan internasional kekinian, terdapat sebuah isu yang masih jarang dibahas dan terpinggirkan, yakni isu seputar gender dan feminisme. Tema feminisme dalam penelitian ini menjadi esensial untuk dibahas dalam disiplin HI sebab pendekatan feminisme terhadap HI hadir untuk menguraikan bagaimana gender memiliki keterkaitan dengan studi ekonomi-politik internasional (EPI). Aitken (2007) menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, telah tumbuh minat dalam EPI untuk melihat bagaimana ekonomi-politik diberlakukan di tingkat lokal oleh non-elit dan melalui berbagai praktik budaya. Namun, terdapat ketiadaan suara feminis di sebagian besar literatur ini serta kecenderungan untuk mengabaikan hubungan sosial gender (Elias & Robert, 2016). Dengan berlanjutnya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam politik internasional, demikian tujuan feminis HI adalah untuk menyoroti, memahami, dan mengatasi ketidaksetaraan serta mendorong disiplin ilmu HI mengakui pentingnya politik gender.

Adapun wacana feminis telah memberikan kontribusi berbentuk evaluasi teori HI yang bertujuan untuk mengekspos bias gender yang telah tertanam kuat dalam teori HI konservatif. Feminisme dalam HI telah dipengaruhi semangat post-strukturalis maupun post-modernis sebab feminis HI tidak setuju dengan cara konvensional dalam mempelajari politik dunia (Narain, 2018). Untuk itu, mereka berusaha melihat keamanan dari lensa sensitif gender dan merekomendasikan tingkat interpenetrasi yang memberi arti penting pada agensi manusia (Tickner, 1992). Hal ini kemudian akan mempertimbangkan bagaimana langkah pendekatan feminisme berupaya untuk merekonstruksi HI dengan cara yang lebih netral gender. Sehingga penggunaan lensa gender dapat bermanfaat untuk memeriksa dan merefleksikan kembali konsep-konsep mendasar dalam HI.

Kajian feminisme dalam HI telah mewarnai area studi HI dengan memberikan sejumlah kontribusi yang berbeda, sehingga debat produktif dari kritik feminis menjadi sebuah diskursus yang sangat menarik. Pada saat yang sama, feminis HI juga memiliki perdebatan teoritis yang kaya di antara mereka sendiri atas pertanyaan kritis tentang epistemologi, ontologi, metodologi, dan etika (True, 2010). Walaupun demikian, alih-alih menjadi sumber perpecahan, kontestasi di antara feminisme dalam HI meliputi epistemologis pengetahuan feminis, ontologi gender, dan sikap etis mempromosikan kesetaraan telah mendorong komitmen normatif bersama untuk mencapai perubahan sosial global yang lebih egaliter. Meskipun terdapat berbagai bentuk aliran feminisme, sejak awal teori feminis HI dengan kompak menentang ketidakhadiran perempuan dari teori dan praktik HI tradisional. Mereka dipersatukan oleh kepedulian kolektif khususnya dalam melawan subordinasi dan opresi terhadap perempuan.

Adapun cendekiawan feminis HI berhaluan liberal seperti Enloe (1989) telah membawa titik balik posisi prinsipil perempuan dengan mempertanyakan “*where are the women?*” dalam HI. Pertanyaan fundamental tersebut semakin memotivasi sarjana HI untuk melihat “ruang-ruang” yang ditempati oleh perempuan dalam politik internasional. Dalam hal ini, “menghilangkan” perempuan dalam teori HI menjadikan HI sebagai analisis politik yang tidak lengkap bahkan naif (Enloe, 1989). Lebih lanjut, Enloe (1989) memusatkan perhatiannya pada bagaimana pengalaman perempuan sebagai individu yang bertumpu pada perbedaan peran gender. Pengalaman tersebut menyoroiti bagaimana keputusan politik patriarki memengaruhi kehidupan pribadi perempuan. Untuk itu, gagasan “*the personal is international*” dan “*the international is personal*” berupaya mendekonstruksi kembali perbedaan apa yang dianggap internasional dan apa yang dianggap pribadi. Dengan demikian, manifestasi politik internasional telah memengaruhi kehidupan kita sehari-hari, demikian pula aktivitas kita sehari-hari memengaruhi proses dan praktik politik internasional.

Pengabaian eksistensi dan pengalaman perempuan di ruang konvensional politik internasional paling relevan dilihat melalui pengalaman perempuan dalam perang. Secara umum, perang telah mengintensifkan ketidaksetaraan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, yang acapkali memaksa perempuan melakukan pekerjaan yang tidak

berbayar, seperti halnya merawat korban perang yang terluka (Chew, 2008). Tidak hanya itu, perempuan juga dipaksa terlibat dalam perdagangan seks dan dikontrak secara informal di pangkalan militer untuk “mempertahankan” moral tentara (Enloe, 1989). Keprihatinan atas perempuan yang selalu menjadi korban dalam perang telah melanggengkan posisi ketidakberdayaan perempuan sebagai suatu objek. Hal tersebut termanifestasikan secara nyata yakni dalam bentuk pemerkosaan sistematis yang digunakan sebagai senjata selama masa perang (*rape as a weapon of war*), seperti contohnya yang terjadi selama perang di Bosnia-Herzegovina dan di Republik Demokratik Kongo (Chew, 2008). Demikian, pengalaman perempuan meruntuhkan argumen bahwa negara adalah mekanisme terbaik untuk memastikan keselamatan individu.

Berdasarkan pengalaman tersebut, feminis HI secara konsisten melihat realitas hubungan internasional dari “*standpoint*” yang sangat kontras dari sudut pandang konvensional (Tickner, 1988). Alih-alih melihat kemampuan militer sebagai jaminan terhadap ancaman eksternal negara, militer dinilai sebagai antitesis terhadap keamanan individu khususnya keamanan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Dalam hal ekonomi-politik internasional konvensional yang biasanya berfokus pada isu-isu seperti perilaku negara untuk meraih keuntungan absolut dan relatif, HI feminis lebih condong berfokus pada bentuk-bentuk ketidaksetaraan ekonomi, populasi yang termarginalkan, feminisasi kemiskinan dan keadilan ekonomi, terutama dalam konteks hubungan antara Utara dan Selatan. Ketika HI umumnya mengambil pendekatan *top-down* yang berfokus pada kekuatan besar, di lain sisi HI feminis memulai analisisnya di tingkat lokal dengan individu-individu dan kelompok rentan yang terbelenggu dalam ketidaksetaraan struktur sosial-ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan feminis HI menarik perhatian lebih pada bentuk ketidakadilan hierarkis dalam konstelasi ekonomi-politik internasional (Sheperd, 2010).

Bentuk-bentuk ketidakadilan hierarkis yang dialami perempuan dalam tatanan ekonomi-politik internasional sangatlah kompleks. Hal tersebut disebabkan oleh perempuan dipengaruhi dengan cara yang berbeda dari pengoperasian sistem ekonomi (Baylis et al., 2014). Terlebih lagi dengan adanya faktor perbedaan status sosio-

ekonomi perempuan yang sangatlah bergantung pada aspek ras, kelas, kebangsaan, agama, bahasa, pendidikan, dan lokasi geografis mereka (Morley & Lugg, 2009). Sebagai konsekuensi logis, hambatan-hambatan tersebut menempatkan perempuan secara tidak proporsional di bagian bawah skala sosial-ekonomi dalam seluruh kelompok lapisan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan laporan *World Bank's Women, Business, and the Law* (2022) yang menyebutkan bahwa terdapat sekitar 2,4 miliar perempuan usia kerja tidak diberikan kesempatan ekonomi yang sama. Adapun terhitung 178 negara mempertahankan hambatan hukum yang mencegah partisipasi ekonomi perempuan dan bahkan terdapat 95 negara tidak menjamin upah yang setara untuk pekerjaan yang sama. Demikian semakin jelas terlihat bahwa kedudukan perempuan dikecualikan serta dimarginalisasikan dari level rumah tangga hingga tingkat nasional dan global.

Dalam lensa sensitif gender, feminis HI melihat ketidaksetaraan struktur ekonomi-politik termanifestasikan dalam bentuk pembagian kerja berbasis gender (*gender division of labor*). Hal ini disebabkan oleh industrialisasi dan peningkatan tenaga kerja upahan telah mendorong peralihan bentuk pekerjaan dari rumah ke pabrik (Washbrook, 2007). Tickner (2014) menyebutkan bahwa konstruksi gender seperti “pencari nafkah” dan “ibu rumah tangga” telah menjadi pusat definisi Barat modern tentang maskulinitas, feminitas, dan kapitalisme. Meskipun banyak perempuan yang bekerja di luar rumah untuk mendapatkan upah tambahan, asosiasi perempuan dengan peran domestik telah melembaga dan dinaturalisasi. Dalam konteks ini, menempatkan beban pekerjaan rumah tangga tidak berbayar pada perempuan telah mengurangi otonomi dan keamanan ekonomi mereka. Sebagai hasil dari ekspektasi peran tersebut, ketika perempuan memasuki dunia kerja, mereka secara tidak proporsional terwakili dalam bentuk-bentuk profesi dengan kategori tertentu (feminisasi pekerjaan).

Konsekuensi nyata dari ekspektasi peran gender yang tepat bagi perempuan telah berkontribusi pada upah rendah dan beban ganda. Hal ini dapat terlihat dari tenaga kerja murah perempuan yang sangat dominan di bidang tekstil dan industri elektronik (Arnold, 2022). Ekspektasi peran gender tersebut menjadi sebuah isu ketenagakerjaan global, di mana perempuan telah dikecualikan dari standar perburuhan nasional dan

internasional. Semakin maraknya perusahaan menciptakan sistem pekerja berbasis rumahan dengan tenaga kerja yang lebih fleksibel juga berimplikasi pada pengurangan hak-hak pekerja perempuan atas penerimaan tunjangan dan keamanan kerja. Sehingga menyebabkan meningkatnya kerentanan ekonomi pada saat krisis seperti yang dimulai pada tahun 2008 (Wörsching, 2011).

Pembagian kerja berdasar gender juga memengaruhi pekerjaan perempuan di bidang pertanian, terutama di banyak wilayah Afrika (Bikketi, 2016). Seringkali perempuan bekerja sebagai tenaga kerja yang tidak dibayar di unit-unit kecil produksi. Akibatnya, laki-laki lebih mungkin untuk mendapatkan akses ke pendapatan, keterampilan baru, dan teknologi. Demikian, keterbatasan kesempatan ekonomi perempuan tidak hanya disebabkan oleh kekuatan pasar saja, tetapi juga proses yang dihasilkan dari ekspektasi gender mengenai pekerjaan yang paling cocok untuk perempuan. Ketidaksetaraan struktur ekonomi gender tersebut dapat membantu kita dalam menjelaskan mengapa mayoritas individu miskin di dunia ini adalah perempuan. Situasi tersebut telah menggambarkan sebuah potret feminisasi kemiskinan, di mana perempuan terwakili secara tidak proporsional dalam fenomena kemiskinan dunia (Christensen, 2021).

Dalam upaya mengatasi kesenjangan kemiskinan global, beberapa institusi selain aktor pemerintah juga memiliki peranan signifikan dalam memutus rantai kemiskinan baik dalam lingkup nasional ataupun lintas batas. Ide-ide kritis yang berasal dari organisasi advokasi pembangunan akar rumput lokal-global dan individu telah berkontribusi pada berkembangnya sudut pandang alternatif mobilisasi sipil dalam agenda pembangunan. Adapun Ekins (1992) berpendapat bahwa konsep alternatif pembangunan haruslah (1) berorientasi pada kebutuhan; (2) endogen, yakni berasal dari masyarakat; (3) mandiri dalam hal sumber daya manusia, alam, dan budaya; (4) berwawasan lingkungan; dan (5) berdasarkan transformasi struktural (ekonomi, masyarakat, gender, relasi kuasa). Maka dari itu, jaringan advokasi yang dibangun tersebut bertujuan untuk memperjuangkan emansipasi dari kelompok yang termarjinalkan. Umumnya, perjuangan tersebut ditujukan kepada pemerintah sebagai

aktor pembentuk kebijakan di sebuah negara. Demikian, eksistensi aktor non-negara dalam HI turut memainkan peranan esensial dalam pembangunan global.

Dalam mempromosikan martabat manusia, *International Non-Governmental Organizations* (INGOs) bergerak di luar fokus tradisional yang berpusat pada negara dan mempunyai visi yang berorientasi pada masyarakat (Farah, 2016). INGOs juga hadir dengan memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melobi perubahan kebijakan (Keck & Sikkink, 2017). INGOs telah menunjukkan sifat kemiskinan yang kompleks dan dinamis dengan membantu memperbaiki kerangka kebijakan pengentasan kemiskinan. Adanya ketidakpercayaan dan fragmentasi dalam hubungan masyarakat telah menyebabkan masyarakat seringkali beralih ke mobilisasi sipil untuk mengatasi penindasan dan kemiskinan. Mereka lebih mengandalkan INGOs untuk bantuan kemanusiaan, investasi ekonomi, serta bentuk pemberdayaan lokal dan regional lainnya. Oxfam sebagai INGOs yang bergerak dalam isu kemiskinan global turut memainkan peranan sentral dalam mengatasi masalah-masalah mendesak dari berbagai perspektif global. Dalam penelitian ini, Oxfam merupakan aktor penting pembangunan global yang memberikan alternatif pendekatan non-negara untuk meningkatkan keamanan ekonomi dengan mempromosikan kesejahteraan dan keadilan ekonomi dari tingkat akar rumput.

Sebagaimana yang tercantum dalam Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang memiliki cita-cita mengentaskan kemiskinan global dan pencapaian kesetaraan gender, aspirasi ini turut diupayakan oleh banyak organisasi non-pemerintah tak terkecuali Oxfam (Rosche, 2016). Advokasi independen Oxfam melalui nilai keadilan gender dan keadilan ekonomi telah memberikan wawasan esensial tentang analisis kebijakan, pengembangan strategi, dan keterlibatan politik Oxfam dalam mengadvokasikan realisasi SDGs. Sehingga bentuk komitmen Oxfam terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan tersebut menjadi suatu tonggak pencapaian penting bagi akselerasi pencapaian SDGs. Hal ini menjadi penting karena menyangkut kemampuan perempuan untuk menikmati seluruh hak asasinya yang terkait dengan keadilan gender, keadilan rasial, dan transformasi sistem ekonomi. Demikian, peneliti memutuskan menjadikan Oxfam sebagai objek utama yang diteliti

mengingat urgensi eksistensi aktor non-negara mampu memberikan implikasi signifikan dalam mengatasi fenomena feminisasi kemiskinan yang menjadi salah satu isu vital untuk mengulas kajian feminisme dan pembangunan dalam disiplin ilmu hubungan internasional.

Berkaitan dengan permasalahan feminisasi kemiskinan tersebut, terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait isu yang diteliti. Adapun literatur karya Christensen (2019) menjelaskan bahwa feminisasi kemiskinan yang disebabkan implikasi kesenjangan *human capital* dapat diatasi dengan pemberian bantuan publik dari pemerintah. Mengenai upaya pengentasan kemiskinan, literatur karya Bradshaw, Chant, dan Linneker (2019) memaparkan adanya hubungan paradoks dari re-feminisasi dengan pengentasan kemiskinan. Literatur ini menjelaskan bahwa adanya pemberian bantuan publik justru tidaklah efektif dalam menangani feminisasi kemiskinan disebabkan adanya keterbatasan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga perempuan akan semakin bergantung pada dana bantuan. Meskipun literatur Christensen (2019) dan Bradshaw et al (2019) sama-sama menjelaskan upaya pengentasan kemiskinan, adapun perbedaan signifikan di antara kajian kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kondisi sosio-demografis antara Indonesia dan negara-negara di Kawasan Amerika Latin yang tentunya memiliki karakteristik berbeda, sehingga pendekatan yang dilakukan tentu berbeda pula.

Terkait dengan kondisi sosio-demografis, literatur karya Gabriel dan Schmitz (2022) menemukan bahwa adanya dominasi serta segregasi antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan telah memaksa perempuan mencari pekerjaan di bidang lain. Selain itu, adanya perbedaan inisiatif dan pilihan di tempat kerja (feminisasi pekerjaan) berdampak pada kesenjangan upah berbasis gender. Tulisan karya Connelly, Dong, dan Zhao (2018) juga menjelaskan bahwa kurangnya pengakuan atas pekerjaan perawatan yang tidak berbayar dalam kebijakan publik merupakan penyebab penting yang meningkatkan ketidaksetaraan gender di China pasca reformasi. Terlebih lagi, kebijakan publik pasca reformasi lebih menghargai efisiensi dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan berfokus pada partisipasi setara dalam ekonomi pasar baru. Apabila berbicara tentang kesetaraan partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan,

literatur karya Mulugeta (2021) menegaskan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan dapat mengurangi kemiskinan perempuan. Adapun temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa interseksionalitas variabel umur, kelas, pendidikan, fertilitas dan budaya menjadi sebuah aspek penting dalam dimensi partisipasi angkatan kerja perempuan.

Dalam upaya penanggulangan feminisasi kemiskinan lainnya, literatur karya Radey, McWey, dan Cui (2019) menjelaskan pentingnya jaring pengaman sosial dalam mengamankan kesejahteraan ekonomi rumah tangga rentan, terkhusus pada rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan berpendapatan rendah. Hendriks (2019) dalam karyanya juga menjelaskan bahwa inklusi keuangan dapat memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan-hambatan seperti daya tawar intra-rumah tangga yang rendah, norma sosial yang membatasi penghasilan perempuan, dan pembatasan mobilitas berdasarkan gender dapat mengurangi kemampuan perempuan untuk mengakses layanan keuangan. Literatur karya Nursini (2020) juga menjelaskan mengenai kontribusi pemerintah Indonesia dalam memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Karya ini menyoroti manfaat dari *community-based* melalui pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan keamanan ekonomi masyarakat. Temuan dalam studi tersebut menjelaskan hubungan antara UMKM dan pengentasan kemiskinan yang dianalisis melalui tren pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya, literatur lain karya Pla-Julián dan Guevara (2020) menjabarkan pentingnya peranan strategik pengarusutamaan gender dalam pembuatan kebijakan dan implementasi di tata kelola multi-level. Penelitian ini menjelaskan implementasi strategi tersebut telah menghasilkan sejumlah program, tindakan, dan bahkan peraturan daerah yang mewajibkan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam aktivitas publik, pendidikan, dan partisipasi inklusif. Pengarusutamaan gender tidak hanya terbatas dalam domain pemerintah saja, Oxfam sebagai organisasi independen dalam hal ini juga mempromosikan pengarusutamaan gender dalam program internal mereka. Pickering-Saqqa (2019) dalam karyanya membahas tentang nilai tambah dari program kemiskinan Oxfam di Inggris. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi program Oxfam

di Inggris sebagai sebuah aset strategis organisasi. Karya ini merupakan area penelitian yang potensial, karena dapat mempertimbangkan sejauh mana aset-aset ini menjadi “bekal” bagi masa depan INGOs.

Berdasarkan pada literatur-literatur terdahulu yang membahas mengenai feminisasi kemiskinan dan perkembangan pengentasan kemiskinan, hingga kini belum ada penelitian yang secara spesifik membahas upaya Oxfam dalam menangani masalah feminisasi kemiskinan di Indonesia dan inilah yang membedakan penelitian ini daripada yang lain. Maka dari itu terdapat garis perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini. Literatur karya Christensen (2019) dan Bradshaw et al (2019) yang membahas feminisasi kemiskinan lebih membahas studi komparatif di negara-negara Amerika Selatan. Beberapa literatur lain seperti Gabriel & Schmitz (2022), Connelly et al (2018), serta Mulugeta (2021) juga menjelaskan faktor-faktor pendorong penyebab feminisasi kemiskinan. Sedangkan literatur lainnya membahas mengenai upaya pengentasan feminisasi kemiskinan oleh pemerintah seperti pada karya Radey et al (2019), Hendriks (2019), dan Nursini (2020). Selain itu, literatur karya Pla-Julían & Guevara (2020) serta Pickering-Saqqa (2019) membahas implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Spanyol dan Inggris. Sementara penelitian ini menitikberatkan pada situasi transformasi pembangunan di Indonesia yang berbeda dalam konteks Utara dan Selatan. Literatur-literatur sebelumnya tentu berbeda dengan penelitian ini. Meskipun terdapat berbagai pengalaman negara lain yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengatasi feminisasi kemiskinan, namun hal ini belum tentu relevan dengan situasi sosio-ekonomi dan demografis di Indonesia.

Fokus analisis dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, yang mana penelitian ini berusaha menjelaskan upaya Oxfam sebagai INGOs untuk mengatasi feminisasi kemiskinan melalui nilai keadilan gender dan keadilan ekonomi yang selaras dengan kaca mata feminis. Studi ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana INGOs berinteraksi dengan permasalahan pembangunan di suatu negara berkembang secara independen. Penelitian ini akan memberikan wawasan dan sudut pandang baru dalam memahami kompleksitas gender dan kemiskinan melalui pendekatan alternatif aktor-non negara. Pada akhirnya, isu-isu mengenai keterkaitan

gender dan pembangunan dalam disiplin HI sangatlah krusial. Wacana feminisme telah memberikan sumbangsih yang bernilai bagi HI secara keseluruhan, yakni dengan menunjukkan bias normatif yang telah lama terpatri dalam jantung disiplin HI. Feminisme berhasil menampilkan kekurangan teori arus utama yang tidak mampu menjelaskan sebagian dari populasi dunia. Demikian pula, analisis feminis dapat mengubah dan membenahi cara berpikir mengenai HI dengan memfokuskan kembali minat serta perhatian kita terhadap isu keamanan manusia, khususnya hak-hak perempuan. Dalam pengertian ini, alat analisis gender yang kaya akan terus memberikan kontribusi yang berwawasan, progresif, dan transformatif bagi disiplin HI.

1.2 Rumusan Masalah

Pengentasan kemiskinan telah menjadi fokus berbagai pihak dalam pembangunan ekonomi internasional sejak tahun 1990-an dan diupayakan seluruh bentuk pekerjaan yang layak bagi semua individu untuk memberantas kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, feminisasi kemiskinan telah menjadi poin penting dalam pembahasan pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender dalam agenda pembangunan. Adapun interaksi paradoks antara kesetaraan gender dan kemiskinan telah menghadirkan tantangan menarik untuk mengatasi kesenjangan kemiskinan berbasis gender dalam pencapaian Agenda 2030 *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berdasarkan uraian subbab sebelumnya, peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut: ***“Bagaimana Upaya Oxfam dalam menangani feminisasi kemiskinan di Indonesia (2017-2019)?”***

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, adapun penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya Oxfam dalam menangani feminisasi kemiskinan di Indonesia (2017-2019).

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap supaya penelitian ini dapat memberikan suatu kebermanfaatannya baik secara praktis maupun akademis, yakni dengan rincian:

Citra Ayu Kinanti, 2023

UPAYA OXFAM DALAM MENANGANI FEMINISASI KEMISKINAN DI INDONESIA (2017-2019)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

1.4.1 Manfaat Praktis

Produk riset dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi wadah pembentukan saran dan informasi mengenai upaya pemberdayaan dan pengarusutamaan gender dalam kerja sama pengentasan kemiskinan nasional, regional, dan global serta studi pembangunan di kawasan Asia Tenggara yang diperlukan oleh instansi pemerintahan, akademisi, lembaga riset, maupun masyarakat luas dalam konteks keilmuan.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada literatur-literatur terkait studi gender dalam hubungan internasional dan studi pembangunan di kawasan Asia Tenggara. Selain itu dari segi informatif, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan atau ilmu bagi civitas akademika di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, khususnya bagi dosen dan mahasiswa di program studi Ilmu Hubungan Internasional, serta referensi kajian akademis pada masa mendatang.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur pemikiran, penelitian ini terbagi ke dalam enam bab dengan beberapa sub bab yang terkandung di dalamnya. Adapun penelitian ini memiliki sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian skripsi atas fenomena yang akan dikaji dalam penelitian ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas konsep, teori, dan kerangka pemikiran dari penelitian ini. Konsep dan teori akan digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi fenomena yang diteliti,

sedangkan kerangka pemikiran akan digunakan sebagai ilustrasi alur pemikiran. Peneliti akan menjelaskan konsep-konsep antara lain yakni konsep feminisasi kemiskinan, teori feminisme liberal, konsep aktor non-negara.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian antara lain mencakup objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian serta tabel rencana waktu penelitian.

BAB 4 FENOMENA FEMINISASI KEMISKINAN DI INDONESIA (2017-2019)

Bab ini akan membahas ketidaksetaraan gender di Indonesia meliputi tingkat partisipasi dan kesempatan ekonomi, pencapaian pendidikan, akses ke layanan kesehatan, dan kepemimpinan perempuan sebagai pendorong feminisasi kemiskinan. Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai dinamika dan perbandingan kondisi kesenjangan kemiskinan berdasar jenis kelamin (feminisasi kemiskinan) pada tahun 2017-2019 yang berimplikasi pada ketidakamanan ekonomi perempuan.

BAB 5 UPAYA OXFAM DALAM MENANGANI FEMINISASI KEMISKINAN DI INDONESIA (2017-2019)

Bab ini secara lebih lanjut akan membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh Oxfam sebagai *international non-government actors* (INGOs) dalam menangani problema feminisasi kemiskinan di Indonesia tahun 2017-2019, termasuk program-program kerja Oxfam yang berdasarkan kepada nilai-nilai keadilan ekonomi dan keadilan gender, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan kelompok rentan melalui pendekatan alternatif yang peka gender.

BAB 6 PENUTUP

Bab ini akan menjadi bagian penutup yang berisikan kesimpulan penelitian dan rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti.